BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/174 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM PENEGAKAN ATURAN PAJAK DAERAH
DAN PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi, diperlukan upaya yang lebih efektif dan efisien dalam pengawasan dan penegakan aturan perpajakan daerah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegakan Aturan Pajak Daerah dan Pelayanan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penegakan Aturan Pajak Daerah dan Pelayanan Retribusi Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak dan wajib retribusi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku;
b. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah;

c. melakukan tindakan penagihan aktif terhadap piutang pajak dan retribusi daerah, termasuk penerbitan surat ketetapan dan tindakan penertiban lainnya;

d. melakukan koordinasi dan dukungan pengawasan serta penertiban objek dan subjek pajak/retribusi daerah yang tidak terdaftar atau tidak patuh;

e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi pajak daerah;

f. melakukan pendataan, pendaftaran, dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah secara akurat dan berkelanjutan;

g. menerbitkan surat-surat terkait perpajakan daerah, seperti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) dan dokumen perpajakan lainnya;

h. menyediakan layanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat atau wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan retribusi daerah;

i. melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi secara rutin terhadap proses pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan;

j. bertanggung jawab untuk menyusun laporan pendapatan daerah secara akurat sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan;

k. mengembangkan strategi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

l. memberikan bantuan hukum baik litigasi dan/atau non-litigasi dalam penagihan hutang pajak kepada wajib pajak;

m. memberikan pertimbangan hukum berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion*/LO), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*/LA) dan/atau Audit Hukum *(Legal Audit)* dalam kegiatan intensifikasi pajak daerah; dan

n. memberikan tindakan hukum lain di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator atau konsiliator dalam penyelesaian permasalahan pajak daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI